

BAB 1

1.1 Latar Belakang

Instansi pemerintah daerah yang didalamnya terdapat beberapa orang-orang yang berbeda kemampuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai rencana yang ditetapkan. Agar rencana tersebut tercapai maka diperlukan suatu pengendalian sebagai proses terlaksananya suatu instansi pemerintah daerah. Sistem pengendalian ini melakukan kegiatan yang memastikan bahwa instansi pemerintah daerah sudah berusaha atau melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Bastian (2010:71), menyatakan bahwa anggaran sektor publik sangat berperan penting dalam instansi pemerintah daerah karena anggaran digunakan sebagai kegiatan perencanaan agar rencana instansi pemerintah daerah terlaksana sesuai dengan tujuan yang direncanakan sebelumnya.

Menurut Mulyadi (2016:129), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan struktur organisasi, metode, pengamanan aset berharga perusahaan, memeriksa ketelitian data akuntansi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan menurut Romney dan Stienbart (2014:204), menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang direncanakan oleh manajemen maupun pihak lain yang memiliki wewenang untuk memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang sistem pengendalian internal pemerintah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat tercapai jika

instansi pemerintah menerapkan sistem pengendalian internal atas semua aktivitas yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengawasan, dan tanggungjawab. Sehingga diperlukan suatu sistem yang memadai agar lebih terjamin tercapainya rencana kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pengendalian internal pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Menurut Mulyadi (2014:180), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan sistem yang penting dalam menjalankan kegiatan instansi pemerintah. Pengendalian internal digunakan untuk mendeteksi serta mencegah terjadinya penyimpangan dan digunakan untuk mengamankan aset daerah. Pengendalian merupakan sistem yang diciptakan untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan adanya pengendalian internal diharapkan bisa mencegah terjadinya risiko dan apabila terjadi kesalahan dapat segera diketahui dan diatasi, sehingga akan membuat kegiatan operasional instansi atau organisasi dapat dikendalikan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang Beralamat di Jalan Rajawali No 4 Sampang, Kabupaten Sampang, merupakan instansi pemerintah daerah yang harus menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Pengendalian internal ditunjukkan sebagai pengawasan terhadap aktivitas operasional instansi pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil topik mengenai “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) Pada Bidang Anggaran Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang”.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) program studi Diploma III Akuntansi merupakan sebuah langkah awal untuk menyusun Tugas Akhir. Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam program sarjana Diploma III Akuntansi diharuskan untuk menyusun suatu karya ilmiah yaitu Tugas Akhir. Dengan menyusun tugas akhir diharapkan mahasiswa dapat mampu menerapkan semua pengalaman yang sudah ditempuh selama kuliah dan praktik kerja lapangan yang sudah dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan data yang sesuai dengan informasi yang ada dan menuangkannya dalam bentuk penulisan karya ilmiah yaitu Tugas Akhir.

1.2 Topik Yang Dilaporkan Pada Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka topik yang diangkat dan dilaporkan pada praktik kerja lapangan yang akan diidentifikasi oleh penulis dalam penulisan tugas akhir adalah Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada Bidang Anggaran Dinas BPPKAD Kabupaten Sampang.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan praktik kerja lapangan ini adalah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada Bidang Anggaran Dinas BPPKAD.

1.4 Kajian Literatur

1.4.1 Sistem Pengendalian Internal

Setiap perusahaan harus menerapkan suatu sistem untuk mengatur kegiatan operasional yang ada pada perusahaan. Dengan diterapkannya suatu sistem yang baik, diharapkan perusahaan bisa mengetahui dan mencegah jika terjadi kesalahan dan kecurangan terhadap aset-aset berharga perusahaan salah satunya, yaitu menggunakan sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi (2002:180), menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang digunakan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya yang dibentuk untuk memberikan keyakinan penuh terhadap pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Rahayu dan Suhayati (2010:221), menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam entitas yang dibuat untuk memberikan keyakinan terhadap tujuan perusahaan, tujuan tersebut sebagai berikut : keandalan laporan keuangan, menjaga aset-aset dan catatan organisasi, patuhnya terhadap hukum dan peraturan.

Menurut Diana dan Setiawati (2011:82), menyatakan bahwa pengendalian internal meliputi rencana perusahaan dan metode yang digunakan untuk mengamankan aset penting perusahaan dan untuk mengetahui keakuratan data akuntansi serta kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Hery (2008:165), menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset perusahaan dari penyalagunaan, tersedianya informasi akuntansi yang akurat, dan dipatuhinya kebijakan dan peraturan oleh pegawai.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang berlaku pada perusahaan merupakan faktor penting untuk diterapkan pada organisasi atau instansi pemerintah daerah yang akan memberikan keyakinan terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu perlu adanya perhatian penuh terhadap penerapan sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya kesalahan yang akan terjadi.

1.4.2 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Agoes (2012:100), menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan proses atau cara yang digunakan oleh manajemen atau pimpinan untuk mengamankan aset perusahaan. oleh karena itu untuk memberikan keyakinan yang digunakan untuk mencapai tujuannya, yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga aset perusahaan

Manajemen memerlukan informasi yang dapat dipercaya untuk mengelolah kegiatan yang ada pada perusahaan. Setiap perusahaan diharuskan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai guna untuk menjaga aset-aset berharga perusahaan dan mencegah terjadinya kesalahan.

2. Mematuhi hukum dan peraturan

Kebijakan prosedur dan peraturan pelaksanaan ditetapkan manajemen sebagai sistem untuk mencapai tujuan. Sistem pengendalian internal diterapkan untuk manajemen bahwa semua peraturan, hukum, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan dipatuhi oleh para pegawai dan perusahaan.

3. Efektifitas dan efisiensi rencana kegiatan

Mekanisme pengawasan yang memiliki tujuan yang sama antar pegawai dan rencana kegiatan pada perusahaan, maksudnya untuk mencegah terjadinya berbagai peristiwa dan keadaan yang berakibat timbulnya ketidak efisienan rencana kegiatan manajemen. Pengendalian internal digunakan untuk mencegah penggunaan sumber daya yang tidak efisien pada organisasi atau perusahaan

4. Keakuratan data informasi akuntansi

Pengawasan yang baik dan memadai diperlukan untuk melindungi data atau aset-aset berharga perusahaan yang mungkin terjadi karena adanya kecurangan, pengsalahgunaan, dan sebab-sebab yang lain yang dapat merugikan perusahaan kedepannya. Manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan dapat dipercaya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan untuk pengambilan keputusan penting. Oleh karena itu penerapan sistem pengendalian internal yang digunakan untuk memberikan jaminan terhadap data akuntansi yang dihasilkan.

1.4.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) sistem ini harus diterapkan sebagaimana mestinya oleh organisasi dan instansi sektor publik yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mewujudkan lingkungan organisasi dan instansi daerah dari dampak yang akan menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi atau instansi dalam bentuk pelaporan yang sudah ditetapkan. Menurut Sadeli (2008),

menyatakan bahwa kegagalan dalam mencapai tujuan perusahaan terjadi karena tingkat kecurangan yang tinggi dan disebabkan karena penyimpangan terhadap anggaran serta pengukuran kinerja para pegawai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2, menyatakan bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan dengan berpedoman pada sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). SPIP digunakan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan penuh terhadap tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan, menyelenggarakan pemerintahan daerah, keandalan laporan keuangan, mengamankan aset daerah, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) merupakan proses saling membutuhkan pada organisasi atau instansi pemerintah yang dilakukan secara terus menerus. Penerapan SPIP dalam bentuk kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi pemerintah guna untuk mencegah kecurangan atau penyimpangan melalui kegiatan pengendalian internal yang baik, laporan keuangan yang terpercaya, pengamanan aset, dan patuhnya terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dicapai apabila pimpinan melakukan penerapan pengendalian atas seluruh kegiatan instansi pemerintah daerah. Oleh karena itu di butuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan instansi untuk mencapai tujuan yang di rencanakan.

Unsur-Unsur pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang sistem pengendalian internal pemerintah dibagi menjadi lima unsur, yaitu sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan gambaran dari struktur organisasi suatu instansi atau perusahaan, dimana lingkungan pengendalian mencerminkan gambaran atau nilai dari setiap bagian pada bidang masing-masing perusahaan yang terdiri dari etika dan integritas, tanggungjawab terhadap pekerjaannya, berkompetensi pada bidangnya dan kompeten terhadap pekerjaannya.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan cara untuk mengetahui kegiatan operasional yang bisa memberikan pengaruh atau dampak buruk terhadap tujuan perusahaan yang akan dicapai. Penilaian risiko sangat berperan penting untuk kelangsungan kegiatan perusahaan karena dengan adanya penerapan penilaian risiko maka perusahaan bisa mengetahui kesalahan yang akan terjadi dan bisa secara langsung melakukan pencegahan terhadap risiko yang ada. Risiko ini bisa timbul karena beberapa faktor, yaitu perubahan dalam lingkungan perusahaan, penerapan teknologi baru, dan sistem informasi yang belum memadai.

Pengendalian internal terhadap penilaian risiko yang pertama melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan perusahaan yang dilakukan. Setelah

penetapan tujuan telah dilakukan, selanjutnya melakukan identifikasi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan atas pencapaian tujuan, kemudian dilakukan penganalisisan risiko yang mungkin bisa terjadi dan dampak yang akan timbul atas risiko tersebut. Kemudian dilakukan respon atau tindakan atas risiko yang terjadi dan melakukan pengendalian yang tepat. Pengendalian yang tepat guna untuk memastikan bahwa respon terhadap risiko yang terjadi sudah berjalan dengan baik.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang direncanakan dan ditetapkan untuk membantu serta memastikan bahwa arahan manajemen telah terlaksana dengan baik. Kegiatan pengendalian diterapkan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian tercapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan sistem yang digunakan untuk menciptakan, menganalisis, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan semua informasi yang ada dengan tujuan untuk menjaga keamanan aset-aset berharga perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, mengatakan bahwa informasi sebagai data yang diolah guna untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan fungsi dan tugas instansi pemerintah daerah. sedangkan komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi atau pesan secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Pimpinan instansi pemerintah daerah sudah melakukan komunikasi yang baik, yang berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, memorandum, situs internet, e-mail, papan pengumuman, dan arahan lisan.
- b. Pimpinan instansi pemerintah daerah telah melakukan komunikasi yang baik dengan para pegawai.

5. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses yang tidak bisa dilewatkan pada perusahaan yang digunakan untuk menentukan kualitas sistem pengendalian internal dari waktu ke waktu serta mengambil tindakan jika terdapat kekeliruan dimasa yang akan datang. Pemantauan atau pengawasan dilakukan melalui aktivitas operasional perusahaan setiap harinya yang dilakukan secara terus menerus atau dilakukan pengevaluasian kerja.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kelima unsur-unsur pengendalian internal merupakan unsur yang saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Hal ini karena proses pengendalian saling berkaitan pada kegiatan yang akan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai perusahaan.

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dalam melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) diharapkan agar dapat mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Trunojoyo Madura.

2. Membandingkan teori yang sudah diperoleh selama masa kuliah dengan kejadian yang terjadi dalam perusahaan.
3. Menambah pengalaman dan pengawasan mahasiswa dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
4. Mahasiswa dapat membandingkan dan melakukan penerapan teori yang diterima di jenjang akademik dengan praktik yang dilakukan di lapangan
5. Mempraktekkan hard skill dan soft skill yang telah didapat dalam masa kuliah.
6. Mahasiswa memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja praktis sehingga secara langsung dapat memecahkan masalah secara langsung kegiatan yang ada di bidangnya masing-masing.

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dengan terlaksananya kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, yaitu :

1. Bagi Mahasiswa Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) :
 - a. Dapat memenuhi tugas mata kuliah praktik kerja lapangan sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Universitas Trunojoyo Madura.
 - b. Sebagai penerapan disiplin ilmu akuntansi yang diperoleh selama kuliah dalam menghadapi permasalahan di perusahaan.
 - c. Memperoleh pengalaman kerja dan mengetahui bagaimana penerapan kerja akuntansi.

- d. Mengetahui secara langsung apa saja kendala dan permasalahan yang terjadi serta mencari tahu bagaimana solusi penyelesaian yang harus dilaksanakan.

2. Bagi Prodi Diploma III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura

- a. Sebagai pengenalan pendidikan program Diploma III Akuntansi pada instansi atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang dihasilkan oleh program Diploma III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
- b. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kurikulum atau program yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna kelulusannya.
- c. Sebagai sarana pembelajaran dan pengenalan yang efektif bagi mahasiswa sebelum lulus dan terjun ke dunia kerja nyata.

3. Bagi Dinas BPPKAD Bidang Anggaran

- a. Sebagai sarana penghubung antara instansi dengan perguruan tinggi khususnya Diploma III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
- b. Sebagai sarana untuk merekrut tenaga kerja yang profesional dan berkompetensi dibidang keahlian masing-masing.
- c. Memberikan kontribusi dan peran positif kepada masyarakat dan khususnya mahasiswa karena telah membantu dalam penyusunan tugas akhir.

4. Bagi Pembaca

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang sama dimasa yang akan datang.
- b. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang akuntansi dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktik kerja lapangan (PKL) dilaksanakan di kantor Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD), yang Berada di Jalan Rajawali No. 4 Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Praktik kerja lapangan ini dilaksanakan pada Tanggal 25 Januari 2021-25 Februari 2021, pukul 07.30-14.30 WIB.

Tema yang diangkat mengenai akuntansi, yaitu dengan topik “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang”.